



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 24 Mei 2016

Halaman: 13

Bakal Cawakot Harus Kumpulkan

■ KPU Tetapkan Syarat Dukungan Calon Independen

YOGYA, TRIBUN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta resmi menetapkan jumlah dukungan KTP minimal untuk Calon Wali Kota (Cawakot) Yogyakarta dari jalur perseorangan. Untuk maju, calon perseorangan harus memiliki 26.374 KTP dukungan dari masyarakat Yogyakarta.

Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, calon independen wajib mengumpulkan dukungan KTP sebanyak 8,5 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT).

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budianto mengungkapkan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Yogyakarta di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 sebanyak 310.280 orang. Dikarenakan jumlah penduduk Yogyakarta sekitar 250 ribu hingga 500 ribu jiwa, maka persentasenya 8,5 persen.

"Aturannya begitu, penduduk di kisaran 250 ribu hingga 500 ribu jiwa, persentase dukungan untuk calon perseorangan sebesar 8,5 persen. Jadi dukungan KTP untuk maju sebesar 26.374 buah," kata Wawan di Kantor KPU Kota Yogyakarta, Senin (23/5).

Diharapkannya, calon perseorangan warganya mengumpulkan minimal 27 ribu KTP. Melalui persebaran relawannya, ia bahkan mengaku bisa mengumpulkan sebelum tengat waktu yang ditentukan oleh KPU.

"Kalau ditanya optimis, kami pasti dan harus optimis. Bahkan saya yakin, teman-teman relawan bisa mengumpulkan jumlah minimum KTP itu sebelum tengat waktunya," ujar Yoyok kepada Tribun Jogja, Senin (23/5).

Sebelumnya, tim relawan paslon Arif-Aki telah mengumpulkan 9 ribu lebih dukungan KTP. Menurut Yoyok, saat ini tim pemenangnya berfokus pada optimalisasi relawan yang sudah ada. Para relawan akan ditingkatkan lagi proses pengumpulan dukungannya hingga ke tahap masyarakat terkecil.

"Relawan yang telah ada, akan coba terus untuk memasuki level kelurahan hingga tingkat RW. Ini kan juga untuk memenuhi syarat jumlah KTP yang berasal dari se-paruh kecamatan Kota Yogyakarta," ungkapnya.

Ia menambahkan, selain optimalisasi kerja relawan, timnya juga akan melakukan pemetaan terhadap dukungan KTP yang telah terkumpul. Hal ini dilakukannya mengingat ada syarat dari KPU tentang jumlah kecamatan atau persebaran wilayah dari KTP yang terkumpul.

"KPU kan menasar persebaran wilayah minimal delapan kecamatan, karena itu kita bedah KTP yang terkumpul agar bisa sesuai syarat ketentuannya," kata Yoyok.

Terkendala teknis

Sementara itu, Sekretaris Jogja Independent (Joint), Yustina Neni mengaku hingga akhir pekan lalu, jumlah dukungan berupa KTP yang terkumpul masih sebanyak 2.900 dukungan. Diakui Neni, pergerakan pengumpulan dukungan lambat lantaran persoalan teknis di internal relawan.

"Dari 45 kelurahan, baru separuhnya saja yang bisa dijangkau relawan. Tapi kami masih optimis bisa mengejar target, seribu dukungan di tiap kelurahan," ucapnya.

Diungkapkan Neni untuk memperoleh seribu dukungan di satu kelurahan, pihaknya akan tetap menggunakan strategi pendirian posko di tiap kelurahan, dan penerjunan tim penjemput KTP. Selain itu, Joint juga mendekati tokoh di berbagai kalangan untuk memberikan dukungan. (gjl/mrf)

NIP. 19690723 199603 1 005

Bakal Cawakot Harus

■ Sambutan Hal13

yang ingin maju dalam Pemilihan Wali Kota (Pihwal-kot) Yogyakarta 2017 segera melakukan komunikasi ke KPU Kota Yogyakarta. Sebab berkas dukungan masyarakat melalui KTP wajib diserahkan ke pihaknya, paling lambat pada 10 Agustus 2016.

"Tapi tidak hanya KTP saja. Berkas dukungan berisi formulir tentang administrasi kependudukan penduduk dilampiri KTP. Selain itu, berkas disusun per kelurahan dengan disertai meterai, dan diketabuh lura setempat. Dalam bentuk softcopy maupun hardcopy," tegas dia.

Wawan menambahkan saat pihaknya melakukan penelitian awal terhadap berkas dukungan terdapat data ganda, maka pasangan calon perseorangan wajib mengganti. Kemudian jika dijumlah, dukungan tak memenuhi syarat yang ditetapkan, calon tersebut harus mengganti dukungan sebesar dua kali lipat.

"Misal saat penyampaian syarat dukungan pada 19-21 September 2016 kurang 500, berarti pasangan perseorangan yang bersangkutan mengganti sebanyak 1.000 dukungan," imbuhnya.

Sementara untuk proses verifikasi dukungan, pihaknya akan mendatangi satu per satu pendukung calon perseorangan. Selain itu, menurutnya, KPU akan menggunakan sistem Aplikasi Pencalonan (Sipalon) untuk mengecek persebaran dukungan untuk menghindari pendukung ganda.

"Karena dukungan harus tersebar, sedikitnya di delapan kecamatan. Kita akan mengeceknya," lanjut Wawan.

Bakal Cawakot Optimis Kumpulkan KTP

PASANGAN calon (Paslon) jalur perseorangan atau independen dalam Pemilihan Wali Kota Yogyakarta 2017, Arif Nurcahyo-Aki Adishakti (Arif-Aki) menyatakan siap mengumpulkan syarat minimum dukungan KTP yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Arif atau yang akrab disapa Yoyok mengaku sangat optimis bersama tim rela-

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005